



KAMIS, 13 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tuntaskan Temuan BPK, Pemprov Bentuk TPTGR

Tersisa 4 Hari Lagi

Tersisa 4 Hari Lagi

BENGKULU - Temuan hasil audit laporan pertanggungjawaban APBD Pemda Provinsi Bengkulu mencapai 1.549 rekomendasi. Walaupun saat ini 1.010 rekomendasi sudah diselesaikan melalui upaya Inspektorat, namun Pemda Provinsi Bengkulu tidak mau terlena.

Rabu (12/12) kemarin dibentuk tim dan pengambilan sumpah Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Tim ini

Sambungan dari hal 9

"Walaupun kecil, kalau itu menyangkut kerugian negara harus dikembalikan," terangnya.

Dia juga menjelaskan kalau 532 rekomendasi BPK yang belum selesai itu tidak semuanya adalah terkait kerugian negara. Ada juga masalah kesalahan administrasi yang harus diselesaikan. "Ini yang akan ditindak lanjuti, masalah temuan ini," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu Henny Kauri mengatakan, mereka sudah mengklasifikasi temuan BPK terhadap audit APBD tersebut melalui *help desk*. Dengan rincian temuan ringan sedang dan berat. Menyangkut administrasi dibuat ringan dan sedang. Sedangkan temuan kerugian negara diklasifikasikan berat.

melibatkan Asisten III, BKD, Inspektorat untuk menindak lanjuti hasil temuan audit keuangan daerah tersebut. Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti menjelaskan, tim ini akan memutuskan hasil audit terhadap



**NOPIAN
ANDUSTI**

pengembalian ganti rugi kerugian negara. Khususnya yang melibatkan ASN. Seluruh ASN diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara.

Walaupun temuannya kecil, namun harus tetap dikembalikan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Jika tidak dikembalikan maka akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).

Baca
TUNTASKAN.
Hal 19

"Per tanggal 17 Desember ini akan diserahkan ke BPK," katanya.

Dia mengimbau seluruh OPD menyelesaikan temuan atau rekomendasi tersebut secepatnya. Sehingga nantinya tidak ada permasalahan rekomendasi BPK yang berlabuh penyelesaiannya ke aparat penegak hukum. "Segera selesaikan," terangnya.

Inspektorat sendiri sudah sering menjadi saksi di Kejaksaan terkait dengan temuan BPK yang akhirnya ditangani oleh aparat penegak hukum. Bahkan juga menjadi saksi dipersidangan kasus korupsi yang awalnya bersumber dari rekomendasi hasil audit BPK tersebut. "Kami imbau segera diselesaikan," tutupnya. (del)